

31-8

327
UTA
P

e.1



LAPORAN PENELITIAN

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA: MEKANISME, AKTOR DAN PENGARUHNYA (KASUS NORMALISASI HUBUNGAN INDONESIA DENGAN REPUBLIK RAKYAT CINA 1989/1990)

Oleh Tim:

- Ketua : Drs. Tri Cahya Utama, M.A.
- Anggota: Drs. Muhammad Adnan, M.A.
- Drs. Susilo Utomo
- Dra. Sulistyowati

UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1997

DIBIYAI OLEH DIP BAGIAN PROYEK OPERASI DAN PERAWATAN
FASILITAS UNIVERSITAS DIPONEGORO NO. 202/XXIII/3/-/1996 TANGGAL
30 MARET 1996 BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
TUGAS NO. 211A/PT09.OP/B/1996, 2 SEPTEMBER 1996

HALAMAN PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian:
POLITIK LUAR NEGRI INDONESIA: MEKANISME, AKTOR DAN
PENGARUHNYA (KASUS NORMALISASI HUBUNGAN INDONESIA- REPUBLIK
RAKYAT CINA TAHUN 1989/1990).

b. Bidang Ilmu : Sosial

2. Ketua Penelitian

a. Nama : Drs. Tri Cahya Utama, M.A.
b. Jenis Kelamin : Laki -laki
c. Golongan dan NIP : III/c (Lektor Muda), 131285904
d. Fakultas/Jurusan : ISIP/Pemerintahan
e. Pusat Penelitian : Universitas Diponegoro

3. Susunan Tim

Ketua Penelitian : Drs. Tri Cahya Utama, M.A.
Anggota : Drs. Moh. Adnan, M.A.
Drs. Susilo Utomo.
Dra. Sulistyowati.

4. Lokasi Penelitian : Jakarta

5. Lama Penelitian : 6 (enam) bulan.

6. Biaya Penelitian : Rp. 2.500.0000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

7. Sumber Dana : DIP Bagian Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas Universitas Diponegoro no: 22/XXIII/3/-/1996 tanggal 3 Maret 1996. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Tugas Penelitian no 211A/PT9.OP/B/1996 tanggal 2 September 1996.

Semarang, 28 Februari 1997.

Menyetujui:
Dekan FISIP UNDIP



Ketua Penelitian:

(Drs. Abdul Kahar Badi)

(Drs. Tri Cahya Utama, M.A.)

NIP 130 024 158

NIP 131 285 904

Mengetahui
Ketua Lemlit UNDIP

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan mekanisme perumusan politik luar negeri Indonesia, mengidentifikasi para aktor yang terlibat dalam perumusan tsb. serta mengetahui besarnya pengaruh masing-masing aktor didalamnya. Untuk memenuhi tujuan penelitian tsb, proses normalisasi hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat Cina tahun 1989/1990 digunakan sebagai acuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme perumusan politik luar negeri Indonesia tidak begitu jelas (terlalu sukar untuk dilacak). Diskusi rahasia diantara para aktor menyangkut proses normalisasi hubungan kedua negara menyebabkan peneliti menghadapi kesukaran untuk menggambarkan bagaimana politik luar negeri Indonesia dirumuskan. Aktor yang terlibat dalam perumusan politik luar negeri ini mencakup pejabat tinggi pemerintah, seperti presiden, menteri luar negeri, menteri sekretaris negara, menteri pertahanan dan keamanan, panglima angkatan bersenjata maupun bukan pejabat pemerintah, seperti ketua kamar dagang dan industri. Diantara aktor yang terlibat, nampaknya presiden merupakan aktor yang mempunyai pengaruh paling besar dalam merumuskan politik luar negeri Indonesia.

ABSTRACT

The objective of this research is to describe mechanism in formulating Indonesia's foreign policy, identify actors who are involved in it and comprehend their influence. To fulfil the objective, the case of reopening diplomatic relations between Indonesia and the People Republic of China in 1989/1990 is used as reference. The result of this research shows that mechanism in formulating the policy is not obvious (too difficult to trace). Secret discussions among actors in the case of the reopening relations between the two countries result in the difficulty of the researchers to portray the procedure in formulating the policy. Actors who are involved in formulating the policy are high-rank government officials, such as president, foreign minister, minister of state secretary, defence minister, armed forces commander and non-government official, such as chairman of Indonesia's chamber of commerce and industry. Among actors in Indonesia's foreign policy, president, seemingly, is the most influential one.

DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN.....	i	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii	
ABSTRAK.....	iv	
DAFTAR ISI.....	iv	
BAB I. PENDAHULUAN		
1. Latar Belakang Masalah.....	1	
2. Pokok Permasalahan dan Tujuan Penelitian.....	4	
3. Tinjauan Pustaka.....	5	
4. Ruang Lingkup.....	9	
5. Pentingnya Penelitian.....	10	
6. Metode Penelitian.....	11	
7. Langkah-Langkah Penelitian.....	11	
8. Tehnik Pengumpulan Data.....	12	
9. Instrumen Penelitian.....	12	
10. Sampel Penelitian.....	13	
11. Analisa Data.....	13	
12. Tehnik Pencermatan Kesahihan Hasil Penelitian.....	14	
13. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	15	
BAB II. DINAMIKA HUBUNGAN INDONESIA DENGAN RRC 1949-1965		
1. Pengakuan Kedaulatan dan Peresmian Hubungan Diplomatik.....	16	
2. Masalah Dwi Kewarganegaraan.....	20	
3. Poros Jakarta-Phnom Penh- Peking-Hanoi-Pyong Yang.....	26	
4. Peran RRC Dalam G30S/PKI.....	31	
BAB III. KEMEROSOTAN HUBUNGAN RI-RRC 1966-1986		
1. Pembekuan Hubungan.....	36	
2. Kendala & Hambatan Kearah Normalisasi Hubungan.....	39	
3. Upaya-Upaya Intensif Kearah Normalisasi.....	42	
BAB IV. SITUASI INTERNASIONAL, REGIONAL DAN NASIONAL DEKADE 1980an.....		45
BAB V. KESEPAKATAN TOKYO DAN NORMALISASI HUBUNGAN KEDUA NEGARA		
1. Kontak Dagang dan Politik KADIN Dengan Pihak RRC.....	52	
2. Menuju Kesepakatan Tokyo.....	55	
3. Beberapa Reaksi dari Dalam Negri.....	82	
BAB VI. TAHAP-TAHAP PERUNDINGAN NORMALISASI HUBUNGAN		
1. Debat Perundingan Lanjutan.....	67	
2. Perundingan Lanjutan.....	78	
3. Pencairan Hubungan Diplomatik.....	82	
KESIMPULAN.....	84	
DAFTAR BACAAN.....	88	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah:

Dalam studi hubungan internasional, dikenal bahwa politik luar negeri merupakan salah satu instrumen pencapaian tujuan nasional. Untuk tetap exist dan dapat mewujudkan tujuan nasionalnya, negara tidak dapat berswasembada atau mengandalkan pada kemampuan dirinya sendiri; sebaliknya, terlebih pada masa modern dewasa ini dimana saling ketergantungan begitu erat, negara sangat berkepentingan untuk berinteraksi dengan negara - negara lain. Interaksi demikian ini dianggap penting mengingat negara -negara tersebut mampu berfungsi sebagai pemasok sebagian kebutuhan nasional negara tsb.

Dalam kaitannya dengan politik luar negeri tersebut, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mekanisme/prosedur yang ditempuh untuk merumuskannya. Sebagai instrumen yang dipakai untuk memenuhi kepentingan seluruh warga negara, politik luar negeri tsb. memerlukan mekanisme tertentu dalam perumusannya; ada prosedur tertentu yang harus ditempuh agar kepentingan semua warga negara dapat terjamin; politik luar negeri tersebut tidak dapat dirumuskan secara sembarangan. Dengan menempuh prosedur (mekanisme) tertentu tersebut, maka arah politik luar negeri itu dapat dipertanggungjawabkan; ia tidak dapat dibuat secara semena -mena dan dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok -kelompok tertentu. Adanya mekanisme tertentu dalam

perumusannya, memungkinkan tujuan nasional, yaitu tujuan yang ingin diraih oleh seluruh warga negara, paling tidak secara teoritikal, akan dapat tercapai.

Sesungguhnya, bukan aspek mekanisme/prosedur perumusannya saja yang perlu difahami dalam kaitannya dengan politik luar negeri sebagai instrumen pencapaian tujuan nasional. Aspek lainnya yang perlu diperhatikan pula adalah para aktor yang terlibat dalam perumusan politik luar negeri tsb. Siapa saja yang terlibat dalam perumusan politik luar negeri tsb? Apakah mereka yang terlibat, yakni aktor -aktor tsb, mewakili semua warga negara, atau setidaknya -tidaknya mewakili kepentingan -kepentingan semua warga negara tsb? Politik luar negeri suatu negara (hasil keputusannya) tidak dapat dipisahkan dari aktor -aktor yang terlibat dalam merumuskannya. Pikiran dan aspirasi yang dikemukakan para aktor itulah yang terutama dibahas dan akhirnya diputuskan sebagai kepentingan nasional.

Berkaitan dengan para aktor tsb, yang sangat perlu untuk diperhatikan pula adalah pengaruh atau kekuasaan mereka masing - masing. Diantara para aktor tsb, siapa yang paling besar dan siapa pula yang paling kecil pengaruhnya? Aktor yang mempunyai pengaruh besar adalah mereka yang ide/pemikirannya banyak mewarnai arah dan bentuk politik luar negeri suatu negara. Sedangkan aktor yang kecil pengaruhnya adalah mereka yang sangat terbatas kemampuannya dalam mewarnai arah dan bentuk politik luar negeri tadi. Pemahaman tentang pengaruh/kekuasaan masing -masing aktor

ini penting karena akan mempermudah pembuatan prakiraan - prakiraan tentang arah dan bentuk politik luar negeri.

Dalam kaitannya dengan politik luar negeri Indonesia, pembahasan mengenai mekanisme/prosedur perumusannya, para aktor yang terlibat serta pengaruh/kekuasaannya masing -masing belum pernah dilakukan. Pembahasan yang dibuat oleh beberapa ahli politik luar negeri Indonesia, seperti Jusuf Wanandi (1980) dan Leo Suryadinata (1996), untuk menjawab hal -hal tsb. diatas masih sangat umum dan kabur sifatnya. Dengan berlatar belakang situasi seperti inilah, maka penelitian yang berkaitan dengan mekanisme/prosedur pembuatan politik luar negeri, para aktor yang terlibat serta pengaruh/kekuasaan mereka masing -masing sangat mendesak untuk dilakukan.

Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tsb, kasus normalisasi hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat Cina (RRC) tahun 1989 yang lalu akan dijadikan sampel. Alasannya adalah bahwa normalisasi dengan RRC merupakan masalah penting dalam politik luar negeri Indonesia. Mengingat kasus normalisasi ini merupakan isu yang penting, maka semua/banyak aktor akan terlibat untuk membicarakannya. Dengan demikian, akan dapat dimonitor siapa saja aktornya yang ikut serta merumuskan. Disamping itu, akan dapat diketahui pula pengaruh/kekuasaan masing -masing aktor: siapa yang terbesar dan siapa pula yang terkecil pengaruhnya! Karena normalisasi ini menyangkut kepentingan orang banyak, tentu saja pembicaraan dan penentuannya melibatkan banyak

pihak pula. Adanya tuntutan/persyaratan yang demikian ini akan memungkinkan dimonitornya mekanisme/prosedur pembuatan keputusan politik luar negeri Indonesia.

Karena normalisasi hubungan Indonesia dengan RRC terjadi tahun 1989 yang lalu, tentu data/informasi yang berkaitan dengan kasus tsb. pada masa sekarang ini sudah cukup banyak. Lagi pula, ada kemungkinan banyak dokumen yang berkaitan dengan kasus tsb. dianggap bukan rahasia lagi. Dengan demikian, diharapkan akan diperoleh data/informasi yang cukup lengkap dan semuanya ini tentu sangat bermanfaat untuk menjawab permasalahan.

1.2. Pokok Permasalahan dan Tujuan Penelitian:

Pada dasarnya, penelitian ini akan mencari jawaban atas tiga permasalahan yang diajukan, yakni: pertama, bagaimana mekanisme atau prosedur pembuatan keputusan dalam politik luar negeri Indonesia; kedua, siapa saja aktornya yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan tsb?; ketiga, seberapa besar pengaruh atau kekuasaan masing-masing aktor yang terlibat tsb!

Dengan memperoleh jawaban yang tepat atas ketiga masalah tersebut akan dimungkinkan diperoleh gambaran yang pasti tentang tata cara serta tahapan yang diperlukan dalam merumuskan keputusan politik luar negeri. Lagipula dengan diperolehnya jawaban yang pasti atas permasalahan tsb. akan didapat keterangan tentang siapa saja yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan: mungkin mereka berasal dari lembaga-lembaga

pemerintah ataupun non pemerintah; mereka mungkin berasal dari lembaga -lembaga sipil maupun militer. Lebih lanjut, dengan diperolehnya jawaban yang pasti atas permasalahan tsb. akan diperoleh informasi siapa yang paling berperanan dan siapa pula yang paling kecil peranannya dalam perumusan keputusan tsb. Dengan demikian, dengan terjawabnya segala permasalahan tsb, akan dapat diketahui apakah pembuatan keputusan tsb. telah melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam masyarakat dan apakah keputusan yang dibuat itu sesuai pula dengan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini pada dasarnya juga bertujuan memperoleh gambaran tentang standard/kriteria arah dan bentuk politik luar negeri yang sesuai dengan kepentingan nasional (seluruh anggota masyarakat).

1.3. Tinjauan Pustaka:

Politik luar negeri secara sederhana dapat didefinisikan sebagai "actions of a state toward external environment" (Holsti 1977: 21). Definisi ini bila diperhatikan secara seksama, mencakup arti yang demikian umum dan luas, karena ia hanya mengacu pada kebijaksanaan luar negeri satu negara terhadap lingkungan luarnya. Sebagai konsekwensinya, definisi ini bisa mencakup aspek politik maupun non politik, seperti ekonomi, hukum, pertahanan keamanan dsb. Diakui bahwa dalam aspek praktisnya pemisahan kedua aspek ini (politik dengan non politik) sukar dilakukan mengingat keduanya berkaitan begitu erat. Namun

demikian, secara teoritis dan untuk kepentingan analisis, kedua aspek perlu dibedakan. Untuk maksud ini, yakni politik luar negeri Indonesia, maka penelitian akan difokuskan pada aspek kebijaksanaan politik Indonesia terhadap lingkungan luarnya, baik itu menyangkut negara, masyarakat lain ataupun organisasi regional maupun internasional.

Yang perlu pula diperhatikan dalam pembahasan politik luar negeri tsb. adalah masalah "tujuan" yang ingin diperoleh oleh negara. Suatu negara memutuskan untuk membuka/menjalin hubungan politik dengan negara lain tentu dilandasi oleh tujuan -tujuan tertentu. Tujuan -tujuan tsb. antara lain dapat berupa: dukungan politik, jaminan keamanan, pencapaian peredaan ketegangan dsb. Pada masa modern sekarang ini, yakni masa dimana saling ketergantungan antar negara demikian tinggi, maka hubungan politik dengan negara lain adalah perlu. Hanya dengan menjalin hubungan politik dengan negara -negara lain tsb. tujuan nasionalnya akan tercapai. Aspek lain yang tidak boleh dilupakan adalah "cara" bagaimana tujuan tsb. akan diperoleh. "Cara" ini bisa mencakup antara lain diplomasi, embargo, boikot, ancaman militer ataupun bentuk bentuk lainnya. Ketepatan "cara" yang dipakai akan menjamin dicapainya "tujuan" politik luar negrinya.

Pada masa ini, yakni masa dimana demokrasi dijadikan basis sistem politik seluruh atau paling tidak hampir semua negara di dunia, maka segala aspek yang berkaitan dengan politik luar negeri tsb. harus dikaitkan dengan kepentingan rakyat seluruhnya.

Politik luar negeri pada masa modern ini tidak lagi ditujukan untuk pemenuhan kepentingan penguasa dan bentuknya ditentukan sendiri oleh penguasa itu sendiri. Mengingat Indonesia memproklamkan diri sebagai negara demokrasi, maka politik luar negeri Indonesia harus ditujukan kepada kepentingan bangsa atau rakyat secara keseluruhan. Politik luar negeri harus ditujukan bagi kesejahteraan, kemakmuran dan keamanan seluruh rakyat Indonesia.

Agar politik luar negeri itu bersifat demokratis, digunakan untuk kepentingan seluruh warga negara, maka diperlukan jaminan - jaminan tertentu. Jaminan yang diperlukan disini yakni adanya suatu mekanisme atau aturan main tertentu didalam membuat keputusan yang berkaitan dengan politik luar negeri tsb (Allison 1971: 170). Dengan "mekanisme" ini yang dimaksud adalah prosedur atau tata cara bagaimana keputusan tsb. dirumuskan. Mekanisme ini mencakup cara penyampaian aspirasi, pembahasan aspirasi yang dikemukakan serta metode bagaimana keputusan politik luar negeri tsb. dirumuskan sebagai konsekwensi munculnya berbagai aspirasi yang muncul. Karena perumusan/pembuatan keputusan politik luar negeri itu memerlukan mekanisme tertentu, maka itu menunjukkan bahwa keputusan tsb. bukan hasil keputusan pribadi/seseorang saja.

Karena politik luar negeri itu ditujukan untuk kepentingan rakyat seluruhnya, maka perumusannya melibatkan sejumlah pribadi atau individu yang mewakili lembaga - lembaga tertentu. Dengan demikian, politik luar negeri dirumuskan oleh sekelompok orang

(aktor). Mengacu pada pengertian bahwa perumusan politik luar negeri memerlukan mekanisme tertentu, hal ini berarti bahwa politik luar negeri tsb. dibuat oleh sejumlah orang. Ia tidak dirumuskan oleh satu orang saja. Aktor yang terlibat dalam perumusan politik luar negeri ini bisa berasal dari kalangan birokrat, lembaga swadaya masyarakat ataupun individu-individu yang dianggap berkompeten. Mereka merupakan wakil dari berbagai kelompok dalam masyarakat/negara dan mereka pun mewakili kepentingan masyarakat/negara. Para aktor ini membawa berbagai aspirasi dan nilai yang bermacam-macam dari kalangan masyarakat.

Karena aktor dalam perumusan politik luar negeri ini bersifat plural, maka keputusan politik luar negeri tsb. merupakan hasil bargaining diantara mereka (Viotti dan Kauppi 1993: 8). Berbagai aspirasi/kepentingan yang ada dibicarakan dan dirundingkan secara bersama-sama. Pengaruh aktor yang terlibat dalam perumusan keputusan tsb. tidaklah sama. Aktor yang mempunyai pengaruh besar adalah mereka yang banyak ikut serta menentukan hasil keputusan. Lagipula aspirasi atau kepentingan mereka banyak mewarnai keputusan yang dibuat. Sedang aktor yang pengaruhnya kecil adalah mereka yang sedikit terlibat langsung dalam proses pembuatan keputusan dan sebagai konsekwensinya, kepentingan atau aspirasi mereka tidak begitu banyak mewarnai keputusan yang ada. Ketidaksamaan pengaruh antar aktor dalam perumusan politik luar ini adalah hal yang wajar, alamiah dan sesuai dengan realitas kekuatan dalam masyarakat.

1.4. Ruang Lingkup:

Secara umum, penelitian ini akan mengacu pada proses normalisasi hubungan Indonesia dengan RRC tahun 1989 yang lalu. Hubungan Indonesia dengan RRC sebelumnya juga akan diteliti, tetapi hanya sebagai latar belakang; sedang perkembangan hubungan kedua negara setelah normalisasi, tidak akan dibahas. Namun demikian, secara khusus, penelitian ini akan menitik beratkan pada aspek mekanisme/prosedur bagaimana keputusan yang berkaitan dengan normalisasi tsb. dibuat. Bagaimana isu tsb. untuk pertama kalinya dilontarkan; bagaimana isu tsb. ditanggapi dan dibicarakan; bagaimana akhirnya isu tsb. akhirnya diputuskan. Lagi pula, penelitian ini akan memfokuskan pada kegiatan/tingkah laku lembaga - lembaga kenegaraan dan pejabat yang memimpinya maupun lembaga - lembaga non negara beserta individu yang membawahnya yang ikut serta merumuskan keputusan normalisasi tsb. Siapa yang melontarkan isu tsb. untuk pertama kali; siapa saja yang menanggapi dan membahasnya; siapa saja yang ikut serta membuat keputusannya! Disamping itu, penelitian ini akan menitikberatkan pada kemampuan masing - masing aktor, baik yang mewakili negara maupun non negara, dalam ikut serta mempengaruhi perumusan keputusan. Walaupun topik penelitian ini berkaitan dengan soal politik luar negeri, hal ini tidak boleh diartikan bahwa pembahasan semata - mata hanya memfokuskan pada aspek yang ada kaitannya dengan soal politik saja. Aspek ekonomi serta pertahanan keamanan juga akan dimasukkan dalam pembahasannya

mengingat pertimbangan dari segi ini tidak dapat diabaikan dalam isu politik luar negeri.

1.5. Pentingnya Penelitian:

Temuan -temuan yang diperoleh dari penelitian ini akan memungkinkan kita mengetahui siapa saja yang berperanan dalam pembuatan keputusan politik luar negeri. Juga temuan -temuan ini akan memungkinkan kita mengetahui siapa (aktor) yang paling berperanan/berpengaruh dalam pembuatan keputusan tsb: juga seberapa besar peranan/pengaruh mereka dalam perumusan keputusan tsb. Lebih jauh, temuan -temuan dalam penelitian ini akan memungkinkan diketahuinya bagaimana keputusan yang berkaitan dengan politik luar negeri tsb. dibuat.

Mengingat selama ini belum diperoleh standard yang pasti, maka temuan -temuan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan mekanisme pembuatan keputusan, para aktor yang terlibat dalam pembuatan keputusan serta besarnya pengaruh masing -masing aktor dalam pembuatan keputusan tsb. dapat dipakai sebagai tolok ukur yang baku. Dengan demikian, akan dapat dibuat semacam acuan penilaian apakah suatu keputusan yang dibuat yang berkaitan dengan politik luar negeri tsb. sudah sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia atau belum! Lagi pula, akan dapat diketahui apakah para aktor yang terlibat dalam pembuatan keputusan, sudah mewakili seluruh kepentingan yang ada dalam masyarakat atautkah belum!

Juga dengan mengetahui siapa saja (aktor) yang berpengaruh besar dalam pembuatan keputusan tsb, akan mempermudah upaya membuat prakiraan -prakiraan tentang arah dan bentuk politik luar negeri Indonesia yang akan diambil. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya keputusan yang berkaitan dengan arah dan bentuk politik luar negeri tsb. tidak terlalu jauh menyimpang/berbeda dari ide ataupun aspirasi mereka yang mempunyai pengaruh besar dalam pembuatan keputusan tsb.

1.6. Metode Penelitian:

Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan seperti dikemukakan tsb. diatas, penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dengan tipe seperti ini, penelitian akan dilaksanakan dalam suasana yang wajar/alamiah. Dengan tipe penelitian seperti ini diharapkan hasil penelitian akan bersifat obyektif atau mampu menggambarkan keadaan seperti apa sesungguhnya. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah seluruh anggota tim. Untuk memperoleh ketepatan jawaban atas permasalahan ini, dan mengingat pula terhadap metode penelitian, maka analisa akan dilakukan secara induktif -kualitatif.

1.7. Langkah -Langkah Penelitian:

Untuk melaksanakan penelitian ini, ada tiga langkah yang akan ditempuh. Pertama, melakukan pengamatan secara menyeluruh. Yang dimaksudkan disini adalah mengumpulkan bahan sebanyak - banyaknya, baik yang bersifat tertulis ataupun berdasarkan hasil

wawancara, yang berkaitan dengan topik penelitian (normalisasi hubungan Indonesia dengan RRC tahun 1989). Kedua, melakukan pengamatan terfokus. Dalam kegiatan tahap ini, pengamatan dititikberatkan pada upaya pencarian jawaban terhadap tiga permasalahan yang dikemukakan diatas. Ketiga, cross check. Dengan kegiatan ini, maka temuan -temuan yang diperoleh dalam kegiatan kedua dibandingkan dengan temuan -temuan yang diperoleh anggota tim penelitian lainnya. Dengan adanya cross check ini, maka kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas penelitian akan diperoleh.

1.8. Tehnik Pengumpulan Data:

Untuk memperoleh data, maka tehnik yang akan digunakan adalah wawancara tak berstruktur. Dengan tehnik ini, proses tanya jawab dengan sumber informasi akan dilakukan secara bebas dengan tujuan utama memperoleh data sebanyak -banyaknya yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Disamping wawancara, upaya yang dilakukan untuk memperoleh data adalah dengan studi pustaka. Bahan akan dicari dari dokumen -dokumen yang dianggap sudah tidak rahasia lagi, majalah, surat kabar, buku dan sumber tertulis lainnya. Kedua tehnik ini, wawancara dan studi pustaka, bersifat melengkapi untuk mengumpulkan data.

1.9. Instrumen Penelitian:

Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif ini, anggota tim penelitian itu sendiri merupakan instrumen utamanya. Dengan

demikian, anggota tim akan melakukan wawancara tak berstruktur secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dan mengetahui proses normalisasi hubungan kedua negara. Untuk dapat menggali data sebanyak-banyaknya, maka sebelum terjun ke lapangan, akan diadakan penjelasan secara singkat tentang tehnik pengumpulan data serta analisa data. Disamping itu, instrumen lain yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku catatan dan tape recorder yang berfungsi untuk mencatat dan merekam informasi/data yang tersedia.

1.10. Sampel Penelitian:

Mengingat sampel pada penelitian ini berhubungan dengan upaya mencari data sebanyak-banyaknya, maka sampel informasi awal adalah mereka yang dianggap bisa "membuka jalan" untuk memahami secara menyeluruh ruang lingkup penelitian. Dengan berpegang pada prinsip "snowball sampling", maka dari mereka yang dianggap "membuka jalan" tersebut akan dimintakan keterangan tentang siapa-siapa saja yang dianggap terlibat dan mengetahui masalah ini. Disamping itu, data akan dikumpulkan dari mereka yang masih tergolong terlibat dengan urusan dipertahankannya normalisasi hubungan kedua negara.

1.11. Analisa Data:

Ada tiga langkah yang akan diambil dalam tahap analisa ini (Miles dan Huberman 1992: 16 -21). Pertama, tahap reduksi data. Tahap ini menyangkut pemilihan dan penyederhanaan data. Dari

segala data yang berkaitan dengan proses normalisasi hubungan Indonesia -RRC tahun 1989 tsb, kemudian akan diseleksi dan difokuskan pada data yang berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan -pertanyaan dalam penelitian ini. Tahap ini dapat dikatakan sebagai "suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan -kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diidentifikasi". Kedua, penyajian data. Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyampaikan hasil -hasil penelitian yang memberikan kemungkinan akan dibuatnya kesimpulan. Dengan melihat hasil penelitian disampaikan ini, dapat difahami apa yang sesungguhnya terjadi. Ketiga, menarik kesimpulan. Dalam tahap ini yang disajikan adalah jawaban atas pertanyaan -pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Tentu saja jawaban ini merupakan hasil verifikasi dari data -data yang diperoleh.

1.12. Teknik Pencermatan Kesahihan Hasil Penelitian:

Untuk memperoleh kesahihan temuan penelitian ini, maka akan digunakan dua teknik yang berjenjang. Pada periode mengumpulkan dan menganalisa data, teknik yang digunakan adalah:

- *) menggunakan teknik snowball sampling
- *) memberikan penjelasan tentang metode wawancara dan menggali data

*)menerapkan prinsip triangulasi sumber data, metode penggalian data dan penggali data

Pada periode setelah mengumpulkan dan menganalisa data:

*)diadakan cross check diantara anggota tim tentang hasil/temuan penelitian.(Faisal 1990: 159).

1.13. Jadwal Kegiatan Penelitian:

Direncanakan kegiatan penelitian ini akan memakan waktu sekitar enam bulan, dengan perincian sbb:

Bulan pertama : persiapan, pengurusan ijin

,, kedua & : terjun lapangan: pengumpulan dan sekaligus ketiga analisa data

,, keempat : penyusunan draft laporan dan diskusi intern

,, kelima : penyusunan laporan dan seminar hasil laporan

,, keenam : revisi laporan, penggandaan laporan dan penyerahan laporan penelitian